

## RENCANA AKSI DAN KESIAPAN EVALUASI BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

**TIM PELAKSANA:**

Konny Sagala, Titin Resmiatin, Ajat Sudrajat, Tintin Prihatiningrum, Fitor Imanuel Huda

Jakarta, 8 September 2017

## Tim Reformasi Birokrasi

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 74/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 3A/KEP/BSN/1/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional secara cepat dan tepat, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3A/KEP/BSN/1/2015 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Standardisasi Nasional perlu ditinjau kembali;

[SK Pembentukan Tim RB BSN  
No.74/KEP/BSN/4/2016](#)



[SK Tim RB BSN  
No.193B/KEP/BSN/7/2017](#)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 193B/KEP/BSN/7/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Reformasi Birokrasi



- Manajemen Perubahan
- Penataan Perundang-undangan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Layanan Publik

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2014	2015	2016
<b>A. Pengungkit</b>					
1	Manajemen Perubahan	5	70,78%	<b>73,18%</b>	<b>73,00%</b>
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	54,25%	54,25%	54,20%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	64,06%	66,83%	64,00%
4	Penataan Tatalaksana	5	69,35%	75,20%	82,60%
5	Penataan Sistem Manaj SDM	15	49,44%	70,49%	88,33%
6	Penguatan Akuntabilitas	6	44,20%	64,91%	56,67%
7	Penguatan Pengawasan	12	42,55%	60,23%	44,92%
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	57,38%	58,76%	79,67%
Sub Total Komponen Pengungkit		60	53,63%	65,60%	68,55%
<b>B. Hasil</b>					
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	63,44%	67,11%	65,20%
2	Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	10	30,00%	87,03%	90,00%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	63,50%	67,98%	77,30%
Sub Total Komponen Hasil		40	55,10%	72,31%	76,65%
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		100	54,22%	68,29%	<b>71,79%</b>



## Rencana Aksi

NO	REKOMENDASI / HASIL EXIT MEETING	RENCANA AKSI
1	Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik dan terukur untuk setiap area perubahan yang akan dicapai	Menyampaikan permohonan informasi target capaian kepada masing-masing tim pelaksana RB
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing-masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap area perubahan.	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap masing-masing target dari setiap Pokja
3	Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu pegawai.	Membuat kompetisi budaya kerja antar unit kerja dengan memberdayakan Agent of Change
4	Quickwins belum dievaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan yang konsisten. (catatan Exit Meeting)	Melakukan evaluasi terhadap Quick Wins tahun 2015 dan mengusulkan Quick Wins tahun 2017??

## Progres Tim Manajemen Perubahan

- Rapat I Tanggal 04 September 2017
- Meminta masukan dari 7 Pokja lainnya terkait target perubahan sd akhir 2017
- Meminta masukan dari Agent of Change yang ditetapkan tahun 2014
- Melakukan evaluasi terhadap Quick Wins 2015 (secara berkala???)

## QUICK WINS

### QUICK WIN TAHUN 2015

1. Layanan Satu Pintu untuk SPK, berupa:
  - a. Layanan Informasi SNI
  - b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi
  - c. Layanan Akreditasi LPK
  - d. Layanan IIN
2. Sistem Monitoring Pengembangan SNI

### Usulan QUICK WIN TAHUN 2017

- **Layanan informasi produk berSNI yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi....**
- **Pemeliharaan SNI melalui kaji ulang sampai tahap rekomendasi**
- **BSN menjadi Role Model Penerapan SNI ISO 37001**

## Role Model & Change Agent

Penetapan Role Model dan Agent of Change



# A.G.E.N.T. OF CHANGE

Actively Generating Exceptional New Thinking

## Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

- Mengupayakan keterlibatan pimpinan dlm manajemen perubahan



Workshop Manajemen Perubahan dari ESQ  
dihadiri Kepala, Pejabat Ess I, II dan III

Rencana Aksi :

Survey Organization Culture Health Index (OCHI) dan penyusunan Nilai-nilai baru organisasi, (krn penghematan ditunda ke tahun 2017)

## Benchmarking Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

### Manajemen Perubahan di Kemenkeu

- Sosialisasi internal
  - *Sharing session* dengan seluruh pegawai Kemenkeu
  - *Booth* Transformasi Kelembagaan (TK) di Gedung Kemenkeu
  - Pelatihan Duta TK
  - Pembuatan *banner* dan beberapa bentuk peraga kampanye TK
  
- Media Komunikasi
  - Terdapat menu khusus mengenai TK di halaman utama *website* Kemenkeu
  - Media sosial
  - Penerbitan *Flyer* bulanan “BERAKSI” (Berita Aktual Transformasi) yang berisi capaian dan rencana TK
  - Pembuatan laporan tahunan kegiatan TK
  - Buku Catatan Inspirasi Transformasi (CITRA) yang berisi kumpulan kisah inovasi dan terobosan yang dicetuskan oleh pegawai Kemenkeu dalam rangka pelaksanaan tugas

## BSN Manajemen Perubahan di Kemenkeu (lanj.)

Edisi VI Tahun 2017, 8 Juni 2017

### BERAKSI Berita Aktual Transformasi

**YANG TELAH KITA CAPAI**

**Perbaikan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (PMK-50/PMK.01/2017):**

- Alokasi DAU yang tidak bersifat final, mengikuti perkembangan PDI netto terimisi sebagai dasar perhitungan
- Penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan dana dan capaian output (performance based transfer)
- Perubahan mekanisme pengalokasian berbasis usulan daerah (proposal based) dengan penguatan peran provinsi dalam memberikan rekomendasi atas usulan kab/kota

Pemilik Inisiatif: Dit. Dana Perimbangan, DJPK

**Penerbitan tinjauan ekonomi, keuangan dan fiskal (bimonthly):**

- Memuat data-data dan informasi terkini mengenai ekonomi makro dan kebijakan fiskal serta mengulas analisis kinerja dan arah kebijakan APBN
- Sebagai acuan dalam penjabaran pedoman serta metodologi nasional (pending review)
- Terbit 2 bulanan, dapat diakses pada [www.fiskal.kemkeu.go.id/dw-bimonthly.asp](http://www.fiskal.kemkeu.go.id/dw-bimonthly.asp)

Pemilik Inisiatif: PKEM dan PKAPBN, BKF

**Piloting penerapan manajemen kepatuhan pajak berbasis risiko (compliance risk management) sesuai Kep-123/PJ/2017:**

- Mencakup fungsi ekstensifikasi, pengawasan, pemantauan, dan penegakan pada KPP Madya dan KPP Pratama
- Piloting dilaksanakan pada 6 KPP Madya dan 11 KPP Pratama tanggal 17 Mei 2017 s.d. 31 Desember 2017

Pemilik Inisiatif: Dit. PKP, DJP

**Program Secondment Kemenkeu (SE-9/PMK.01/2017):**

- Penugasan beberapa pejabat/pegawai dan DJP, DJBC ke BIR selama 3 bulan per tanggal 1 April 2017
- Penugasan pegawai DJP ke DJBC dan sebaliknya selama 3 bulan per tanggal 1 April 2017
- MoU antara Kemenkeu, BI, OJK dan LPS terkait secondment pejabat/pegawai Kemenkeu pada instansi-instansi tersebut

Pemilik Inisiatif: Biro SDM, Setjen

**Penetapan peraturan terkait pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada Bagian Anggaran Berdahara Umum Negara (BA BIN) sesuai PMK-47/PMK.05/2017:**

- Proses likuidasi entitas akuntansi pada BA BIN dapat terlaksana secara terbit dan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah
- Menerbitkan aset milik Pemerintah Pusat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh entitas akuntansi yang dilikuidasi

Pemilik Inisiatif: Dit. APK, DJPB

**FOKUS BERAKSI: MODERNISASI SISTEM INFORMASI DJP UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK**

Pemilik inisiatif: Direktorat TTKI, DJP

Tujuan:

- Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (core tax system) yang terintegrasi
- Peningkatan jumlah layanan, keamanan, kehandalan, stabilitas dan kemudahan akses layanan elektronik DJP

**TEROBOSAN**

- Pembaharuan infrastruktur dan pembangunan modul core tax system secara selektif
- Pengembangan multichannel e-services:
  - penggunaan smartcard dan integrasi ke layanan publik lainnya
  - layanan mandiri bagi WP melalui kioski Pajak
  - layanan e-service versi mobile
  - offline electronic form untuk e-filing
  - TPI online
  - taxpayer account
  - single portal internal
- Kejasama dengan perbankan untuk pembayaran pajak melalui kartu kredit

**PROGRESS**

- Penyelesaian e-FORM yang mengakomodasi pelaporan SPT-1770 dan 1770S
- Penyempurnaan proses bisnis terkait fungsi utama Direktorat Jenderal Pajak (Business Process Reengineering)
- Penyusunan project plan, persiapan penganggaran, dan pengendalian

**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional

## BSN Manajemen Perubahan di Kemenkeu (lanj.)

- Tugas Duta TK
  - melakukan sosialisasi, membantu terlaksananya proses perubahan dalam kaitannya dengan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan di lingkungan unit kerja masing-masing
  - melakukan pengumpulan umpan balik, baik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan terkait implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
  - berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
  - menjadi penghubung dengan pegawai Kementerian Keuangan dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
  - menjadi panutan (*role model*) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menerapkan inisiatif dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan pelanggan sebagai bentuk dukungan terhadap Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan



## Usulan perubahan untuk BSN

- Pelaksanaan sosialisasi dan *sharing session* tentang RB kepada seluruh pegawai BSN untuk meningkatkan *awareness* dan mendapatkan *feedback*
- *Redesign* dan/atau optimalisasi *website* BSN pada submenu RB
- Penyampaian aktivitas bulanan tentang rencana dan capaian RB sebagai sarana informasi dan bahan *money*
- Pembuatan laporan tahunan
- Meningkatkan peran *agent of change* dalam pelaksanaan RB dan implementasi budaya integritas



TERIMA KASIH  
THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Members of



[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)



Komite Akreditasi Nasional

Members of



[www.kan.or.id](http://www.kan.or.id)

16